

ABSTRACT

This research aims to determine the imposition tariff in calculation and reporting of income tax article 21, to understand the calculating and reporting the real income tax article 21 on employees' salaries in DPPKAD Kabupaten Karawang, and problems that may be occur in the fulfillment of tax obligations on income tax article 21 of employees' salaries in DPPKAD Kabupaten Karawang.

The data were analyzed descriptively. This study uses field research by interviewing, and using methods of research literatures and the other sources relevant to the issues discussed in this study.

The results are imposition of tariffs all components of calculation and reporting used by DPPKAD Kabupaten Karawang in accordance with applicable laws and regulations, except the imposition tariff on THT, the mistake tariff on THT made income tax calculation article 21 of the employees' salaries wrong and the reporting of income tax article 21 was done to KPP Pratama Kabupaten Karawang, problems of tax obligations' fulfillment on income tax article 21 in DPPKAD Kabupaten Karawang for salaries was lack of knowledge among employees for tax laws, especially for article 21 income tax.

Keywords: Calculating Income Tax Article 21 of employee's salaries, Reporting Income Tax Article 21 of employee's salaries

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tarif dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, apakah DPPKAD Kabupaten Karawang melakukan penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh 21 atas gaji PNS pada DPPKAD Kabupaten Karawang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dimulai dari pengumpulan data melalui wawancara, serta menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui tinjauan dan kajian literatur, serta sumber lain yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah penerapan tarif seluruh komponen penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh DPPKAD Kabupaten Karawang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali penerapan tarif pada Iuran THT, kesalahan atas penerapan tarif Iuran THT membuat penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS menjadi keliru dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh masing-masing PNS ke KPP Pratama Kabupaten Karawang, permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 atas gaji PNS di DPPKAD Kabupaten Karawang adalah kurangnya pengetahuan para PNS atas peraturan perpajakan, khususnya PPh Pasal 21.

Kata-kata kunci: Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS, Pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1 Pajak	9
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	9

2.1.1.2	Fungsi Pajak	11
2.1.1.3	Tata Cara Pemungutan Pajak	11
2.1.1.4	Tarif Pajak	15
2.1.1.5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	16
2.1.2	Jenis-Jenis Pajak	18
2.1.3	Pajak Penghasilan	20
2.1.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan (PPh).....	20
2.1.3.2	Pemotong PPh Pasal 21	21
2.1.3.3	Subjek dan Bukan Subjek PPh Pasal 21	23
2.1.3.4	Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21	26
2.1.3.5	Kewajiban dan Hak Wajib Pajak PPh Pasal 21	31
2.1.3.6	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	34
2.1.3.7	Tarif Pajak PPh Pasal 21 dan Penerapannya	35
2.1.3.8	Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan	38
2.1.4	Saat Terutang PPh Pasal 21	43
2.1.5	Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan POLRI	44
2.1.6	Surat Pemberitahuan (SPT)	49
2.1.7	Sanksi Administrasi	51
2.2	Kerangka Pemikiran.....	55
BAB III METODE PENELITIAN		59

3.1	Objek Penelitian.....	59
3.1.1	Sejarah DPPKAD Kabupaten Karawang	59
3.1.2	Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Karawang.....	61
3.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Karawang.....	62
3.1.4	Susunan Organisasi DPPKAD Kabupaten Karawang.....	63
3.2	Jenis Penelitian.....	66
3.3	Operasionalisasi Variabel	66
3.4	Populasi dan Sampel	66
3.4.1	Populasi	66
3.4.2	Sampel	67
3.5	Jenis Data	68
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.7	Teknik Analisis Data.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		72
4.1	Hasil Penelitian	72
4.1.1	Pengenaan Tarif dalam Penghitungan dan Pelaporan	
	PPh Pasal 21	72
4.1.2	Analisis Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21	77
4.1.3	Permasalahan yang Terjadi dalam Pemenuhan Kewajiban	
	PPh Pasal 21	80
4.2	Pembahasan.....	62
4.2.1	Pengenaan Tarif dalam Penghitungan dan Pelaporan	

PPH Pasal 21	82
4.2.2 Analisis Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21	84
4.2.3 Permasalahan yang Terjadi dalam Pemenuhan Kewajiban	
PPH Pasal 21	88
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	58
Gambar 3.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karawang	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan Penerimaan Perpajakan.....2
Tabel 1.2	Rekap Jumlah Pegawai DPPKAD Kabupaten Karawang.....4
Tabel 2.1	Tarif Pasal 17 UU PPh35
Tabel 2.2	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap bagian a.....39
Tabel 2.3	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap bagian b.....40
Tabel 2.4	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap bagian c.....40
Tabel 2.5	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap bagian d.....41
Tabel 2.6	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap bagian e.....41
Tabel 2.7	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap bagian a.....43
Tabel 2.8	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap bagian b43
Tabel 2.9	Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Denda53
Tabel 2.10	Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Bunga54
Tabel 2.11	Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Kenaikan55
Tabel 2.12	Penelitian Terdahulu56
Tabel 4.1	Tunjangan Jabatan Struktural.....73
Table 4.1	Tunjangan Umum.....74
Tabel 4.3	Tunjangan Beras.....74
Tabel 4.4	Penghitungan Iuran THT oleh DPPKAD Kab. Karawang.....76
Tabel 4.5	Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji PNS menurut DPPKAD Kab. Karawang Tahun Pajak 201278
Tabel 4.5	Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji PNS menurut DPPKAD

	Kab. Karawang Tahun Pajak 2012.....	79
Tabel 4.6	Penghitungan Iuran THT menurut DPPKAD Kab. Karawang dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/1981 Tahun Pajak 2012	83
Tabel 4.7	Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji PNS DPPKAD Kab. Karawang menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/1981	85
Tabel 4.7	Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji PNS DPPKAD Kab. Karawang menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/1981	86
Tabel 4.8	Selisih Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS menurut DPPKAD dan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/1981	87